

Proyek Jaring Pengaman Sosial Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional serta Masalah Pendesentralisasiannya; Ringkasan Studi di Tiga Propinsi

Djaka Soehendra & Kunthi T.

Abstrak

Krisis moneter yang terjadi tahun 1997 lalu ternyata meluas ke berbagai bidang. Angka pengangguran dan penduduk miskin meningkat pesat. Salah satu problema sosial ekonomi yang menonjol yang terjadi adalah kesulitan orang tua untuk membiayai kelanjutan sekolah anak-anaknya. Pemerintah kemudian melaksanakan Program Jaringan Pengaman Sosial (Social Safety Net Program) khusus di bidang pendidikan yaitu Proyek Aku Anak Sekolah (AAS). Proyek ini mempunyai dua cakupan kegiatan, yaitu JPS beasiswa (Scholarship) yang ditujukan bagi siswa dari tingkat SD/MI, SLTP/Tsanawiyah dan SMU/Aliyah/SMK, termasuk sekolah luar biasa, dan Dana Bantuan Operasional (DBO) (grants) yang ditujukan untuk sekolah-sekolah swasta dan negeri dari tingkatan yang sama. Pihak pengelola menyatakan bahwa proyek AAS merupakan “crash program”, alasannya karena dilaksanakan untuk menanggapi krisis ekonomi yang terjadi mulai tahun 1997, dan pelaksanaannya mulai tahun 1998 sampai 2003. Proyek dilaksanakan oleh Departemen Pendidikan Nasional dengan dukungan dana dari Bank Dunia dan Asian Development Bank serta APBN.

Dengan menggunakan: a) metode penelitian kuantitatif (dengan kuesioner) dan b) dilengkapi dengan metode kualitatif (wawancara dan pengamatan secara terbatas), dilakukanlah kajian tentang kinerja dan tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek AAS di tiga propinsi, yaitu Propinsi Jawa Timur (di Trenggalek, Bojonegoro, Surabaya), Propinsi Jawa Barat (di Serang, Sukabumi, dan Bogor), dan Propinsi Sulawesi Utara (di Minahasa, Gorontalo, dan Bitung). Masing-masing dipilih satu kota (d/h Kotamadya) dan dua kabupaten (d/h Daerah Tingkat II). Penggunaan cara pandang dan kerangka pikir yang holistik serta didasari oleh data dari hasil penelitian kuantitatif dan kualitatif ditujukan untuk lebih mengungkap berbagai temuan penelitian ini.

Dari hasil penelitian antara lain terungkap bahwa atau tidaknya seorang murid belajar di sekolah (atau diperoleh tidaknya bantuan beasiswa maupun DBO) tidak hanya melulu terkait dengan masalah ekonomi, melainkan juga dengan masalah hubungan sosial, kondisi keagamaan bahkan masalah konstalasi politik setempat. Rupanya gejala-gejala sosial ekonomi politik dan lainnya saling kait mengkait dalam mempengaruhi kinerja proyek AAS. Sementara, proyek AAS rupanya kurang tepat kalau dilaksanakan sebagai “crash program”. Alasannya karena krisis sendiri belum berakhir, dan akibat buruknya – terutama terhadap dunia pendidikan – diprediksikan masih akan lama berlangsung.

Repotnya, dalam perjalanan proyek terjadi perubahan yang prinsipil yaitu lahirnya peraturan perundangan baru di bidang Otonomi Daerah sebagaimana tertuang di dalam UU No. 22/1999 (yang mulai dilaksanakan Januari 2001) dan UU No. 25/1999.

Sayangnya, peraturan pelaksanaannya, khususnya untuk bidang desentralisasi pendidikan masih kurang jelas dan tuntas. Lalu bagaimana nasib proyek yang penting itu kelak?.